

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu lingkungan kini telah menjadi persoalan mendesak berskala global yang membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, hingga masyarakat luas. Perubahan iklim, polusi udara, kerusakan lingkungan, dan keterbatasan air bersih merupakan sejumlah masalah lingkungan yang semakin kompleks. Permasalahan ini bukan sekadar urusan kebersihan atau tampilan fisik lingkungan, melainkan juga memiliki dampak langsung terhadap kesehatan publik, kondisi sosial, perekonomian, serta daya tahan lingkungan secara keseluruhan. Dalam situasi urbanisasi yang kian pesat, pengelolaan sampah menjadi tantangan besar yang harus ditangani secara terencana dan berkesinambungan. Tanpa pengelolaan yang tepat, keberadaan sampah berpotensi menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup masyarakat kota. (Julia Lingga et al., 2024)

Setiap tahunnya, persoalan terkait sampah di Indonesia mengalami peningkatan kompleksitas. Volume sampah yang dihasilkan bertambah seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya konsumsi, sementara upaya pengelolaannya masih belum menunjukkan hasil yang memadai. Salah satu penyebab mendasar adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Hal ini diperburuk oleh keterbatasan sarana daur ulang serta minimnya fasilitas pengolahan sampah yang layak. Dalam situasi tertentu, sebagian warga bahkan terpaksa membuang sampah ke saluran air, sungai, atau bahu jalan. Tindakan ini tak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menyumbat aliran air dan meningkatkan risiko banjir saat musim hujan tiba. (Mulyani, 2021)

Berikut di tampilkan tabel data timbulan sampah di Indonesia. Data tersebut menggambarkan jumlah sampah yang dihasilkan dalam satu tahun dan dapat digunakan untuk melihat kondisi serta perkembangan permasalahan persampahan di Indonesia.

Tabel 1. 1
Timbulan Sampah Di Indonesia

No	Provinsi	Jumlah Timbulan /tahun (ton)
1	Aceh	931,689.37
2	Sumatera Utara	1,197,497.09
3	Sumatera Barat	718,705.75
4	Riau	753,772.37
5	Jambi	163,516.42
6	Sumatera Selatan	510,895.26
7	Bengkulu	146,296.42
8	Lampung	1,005,889.96
9	Bangka belitung	158,602.18
10	Kepulauan Riau	157,339.83
11	DKI Jakarta	725,690.82
12	Jawa Barat	4,990,609.56
13	Jawa Tengah	4,916,437.48
14	Yogyakarta	708,359.03
15	Jawa Timur	6,394,458.47
16	Banten	2,008,938.74
17	Bali	1,254,235.00
18	Nusa Tenggara Barat	172,403.95
19	Nusa Tenggara Timur	600,111.55
20	Kalimantan Barat	680,742.85
21	Kalimantan Tengah	442,991.05
22	Kalimantan Selatan	739,730.97
23	Kalimantan Timur	626,452.54
24	Kalimantan Utara	51,661.45
25	Sulawesi Utara	456,409.67
26	Sulawesi Tengah	294,517.23
27	Sulawesi Selatan	1,309,596.12
28	Sulawesi Tenggara	201,441.95
29	Gorontalo	72,967.64
30	Sulawesi Barat	86,460.29
31	Maluku	162,201.11
32	Maluku Utara	19,652.42
33	Papua	69,616.01
34	Papua Barat	83,151.96
35	Papua Selatan	17,305.38
36	Papua Tengah	58,160.01
37	Papua Pegunungan	-
38	Papua Barat Daya	18,974.60

Sumber: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan> (diakses 8 mei 2025)

Berdasarkan data timbulan sampah nasional yang ditampilkan dalam gambar, terlihat bahwa jumlah sampah yang dihasilkan di Indonesia berada pada angka yang cukup besar, yaitu mencapai 33,980,337.81 ton per tahun. Tabel tersebut memaparkan sebaran volume sampah dari berbagai provinsi di Indonesia, yang menunjukkan kontribusi signifikan dari wilayah-wilayah berpenduduk padat dan tingkat konsumsi tinggi. Provinsi Jawa Tengah tercatat sebagai penghasil sampah terbesar dengan timbulan mencapai sekitar 6,394,458.47 ton, disusul oleh Jawa Barat sebanyak 4,990,609.56 ton, dan Jawa Timur sebanyak 4,916,437.48 ton. Peningkatan ini selaras dengan pertumbuhan jumlah penduduk, urbanisasi, serta pola konsumsi masyarakat yang cenderung menghasilkan lebih banyak limbah domestik. Puncak tertinggi timbulan sampah tercatat berasal dari Provinsi Jawa Barat. Hal ini tidak mengherankan mengingat Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, serta menjadi pusat berbagai aktivitas industri, perdagangan, dan urbanisasi. (KLHK, 2024)

Alasan utama Jawa Barat menjadi penyumbang timbulan sampah terbesar di Indonesia terutama karena jumlah penduduknya yang sangat tinggi. Berdasarkan data BPS tahun 2024, jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 50.345.200 jiwa, atau sekitar 17,88% dari total populasi Indonesia, menjadikannya provinsi terpadat secara nasional. Aktivitas harian seperti konsumsi rumah tangga, kegiatan komersial, dan industri di wilayah urban seperti Bandung, Bekasi, dan Bogor menghasilkan volume sampah yang besar setiap harinya. Tingginya tingkat urbanisasi tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang optimal, infrastruktur daur ulang yang terbatas, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumber. Kombinasi faktor-faktor tersebut menyebabkan Jawa Barat terus menduduki posisi teratas dalam timbulan sampah nasional. (KLHK, 2024)

Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi persampahan di Provinsi Jawa Barat, pada berikut ditampilkan data timbulan sampah di Jawa Barat.

Tabel 1. 2
Timbulan Sampah Provinsi Jawa Barat

No	Provinsi/ Kota	Jumlah Timbulan /Tahun (Ton)
1	Kab. Ciamis	182.871,42
2	Kab. Kuningan	179.838,71
3	Kab. Majalengka	342.527,64
4	Kab. Sumedang	176.030,01
5	Kab. Indramayu	414.835,78
6	Kab. Purwakarta	152.672,78
7	Kab. Karawang	389.444,24
8	Kab. Bekasi	614.462,32
9	Kab. Bandung Barat	275.091,74
10	Kab. Pangandaran	64.993,07
11	Kota Bogor	275.707,63
12	Kota Bandung	546.151,49
13	Kota Cirebon	78.969,28
14	Kota Bekasi	645.426,98
15	Kota Depok	497.529,02
16	Kota Tasikmalaya	122.229,45
17	Kota Banjar	31.828,00

Sumber: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan> (diakses 8 mei 2025)

Berdasarkan data timbulan sampah tahun 2024, Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai wilayah dengan jumlah produksi sampah tertinggi kedua di Indonesia mencapai 4,990,609.56 ton. Tabel yang ditampilkan menunjukkan bahwa volume sampah di Jawa Barat mencapai angka tinggi, mencerminkan tingginya tingkat konsumsi dan aktivitas penduduk di provinsi ini. Dominasi Jawa Barat dalam jumlah timbulan sampah tidak terlepas dari jumlah penduduk yang besar, kawasan urban yang padat, serta pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Selain itu, sistem pengelolaan sampah yang belum optimal di sejumlah daerah turut berkontribusi terhadap tingginya akumulasi sampah. Gambar tersebut juga menjadi bukti visual yang memperkuat urgensi perlunya inovasi kebijakan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

Ditinjau dari data volume timbulan sampah tahun 2024, Kabupaten Bogor menempati posisi pertama sebagai penyumbang sampah terbanyak di

Jawa Barat, disusul oleh Kabupaten Bekasi di urutan kedua, dan Kota Bandung di posisi ketiga. Ketiga daerah ini memiliki kesamaan dalam hal jumlah penduduk yang besar dan intensitas aktivitas ekonomi yang tinggi, yang secara langsung berkontribusi terhadap tingginya produksi sampah. Khususnya di Kota Bandung, sebagai salah satu pusat kota metropolitan dan destinasi wisata utama, volume sampah yang dihasilkan sangat besar setiap harinya. Sampah domestik dari rumah tangga, limbah komersial dari restoran, kafe, serta aktivitas wisata menjadi penyumbang utama. (KLHK, 2024)

Tabel 1. 3
Timbulan Sampah Kota Bandung Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Timbulan /Tahun (Ton)
1	2020	562,034.59
2	2021	581,280.03
3	2022	581,876.52
4	2023	587,565.25
5	2024	546,151.49

Sumber: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan> (diakses 8 mei 2025)

Tabel yang ditampilkan menunjukkan tren timbulan sampah di Jawa Barat dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah timbulan sampah tercatat sebesar 562,034.59 ton. Angka ini kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 581,280.03 ton, yang mencerminkan kenaikan sebesar 3.24%. Pada tahun 2022, jumlah timbulan sampah hampir stagnan, dengan sedikit peningkatan menjadi 581,876.52 ton. Meskipun ada fluktuasi, angka timbulan sampah kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 587,565.25 ton, menunjukkan adanya tren pertumbuhan konsumsi dan kegiatan ekonomi yang semakin berkembang. Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan jumlah timbulan sampah menjadi 546,151.49 ton, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, program pengurangan sampah yang lebih efektif, atau perbaikan dalam sistem daur ulang dan pengelolaan sampah di tingkat daerah. Meskipun terdapat penurunan, namun jumlah timbulan sampah ini

tetap menunjukkan bahwa pengelolaan sampah masih menjadi tantangan besar. Penurunan yang terjadi mungkin juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti perubahan pola konsumsi, penurunan aktivitas ekonomi akibat situasi tertentu, atau dampak dari kebijakan pengurangan sampah yang mulai diterapkan secara lebih luas. (KLHK, 2024)

Tren penurunan timbulan sampah pada tahun 2024 menjadi indikasi awal bahwa berbagai intervensi kebijakan dan inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sampah mulai menunjukkan hasil yang positif. Namun, tantangan pengelolaan sampah masih tetap kompleks dan memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Menurut Waste Management (2021), pengelolaan sampah tidak hanya sebatas membuang sampah ke tempat pembuangan akhir, melainkan mencakup seluruh rangkaian proses mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, perawatan, hingga pembuangan, yang harus dikawal melalui sistem monitoring dan regulasi yang ketat agar dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia dapat diminimalkan. (Awino & Apitz, 2024)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjadi landasan hukum utama dalam mengatur tata kelola sampah di Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, mulai dari pengurangan, pemilahan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir. UU ini juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mendukung sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Adanya peraturan ini menjadi pijakan bagi berbagai program pengelolaan sampah di daerah, termasuk inisiatif seperti bank sampah dan program Kang Pisman di Kota Bandung.

Salah satu pasal penting dalam UU ini adalah Pasal 20 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang menjelaskan secara rinci mengenai langkah-langkah pengurangan sampah yang harus dilakukan. Pada ayat (1), dijelaskan bahwa pengurangan sampah meliputi tiga kegiatan utama, yaitu pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Artinya, upaya pengurangan sampah tidak hanya sekadar mengurangi jumlah sampah yang dibuang, tetapi juga melibatkan proses

pengolahan kembali agar sampah dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, pada ayat (2), disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan langkah-langkah konkret untuk mendukung pengurangan sampah tersebut. Langkah-langkah ini meliputi penetapan target pengurangan sampah secara bertahap dalam kurun waktu tertentu, memfasilitasi penggunaan teknologi ramah lingkungan, memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan, mendukung kegiatan penggunaan ulang dan daur ulang, serta membantu dalam pemasaran produk-produk hasil daur ulang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi kewajiban pemerintah untuk menciptakan sistem yang mendukung pengurangan sampah secara berkelanjutan dan terpadu. (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18, 2008)

Salah satu bentuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berkembang luas di berbagai daerah di Indonesia adalah bank sampah. Bank sampah merupakan sistem pengumpulan sampah yang dijalankan seperti layaknya sistem perbankan, di mana masyarakat dapat "menabung" sampah anorganik yang sudah dipilah dan akan dicatat dalam buku tabungan. Sampah yang dikumpulkan akan didaur ulang atau dijual, dan hasilnya dapat dikonversi menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat. Konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi pengurangan sampah, tetapi juga mendorong kesadaran lingkungan dan pemberdayaan ekonomi warga. Bank sampah bekerja dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan menjadi sarana edukasi masyarakat tentang pentingnya pemilahan serta pengelolaan sampah dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Melalui partisipasi aktif warga, bank sampah dapat membantu menurunkan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Upaya pengurangan dan pengelolaan sampah secara terpadu dapat dilihat melalui program *Kang Pisman* (Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan) yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Bandung. Program ini bertujuan untuk membentuk kesadaran masyarakat agar mulai mengurangi timbulan sampah dari sumbernya, yakni rumah tangga. Melalui edukasi dan pembiasaan, warga

diajak untuk memilah sampah organik dan anorganik, serta memanfaatkan kembali sampah yang masih memiliki nilai guna. Selain berfokus pada pengurangan, Kang Pisman juga menjadi bentuk penanganan sampah yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengolahan kompos dari limbah organik maupun pemanfaatan sampah anorganik melalui bank sampah. Keberhasilan program ini tidak hanya membantu mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tetapi juga memperkuat pola hidup berkelanjutan dan mempererat hubungan sosial antarwarga melalui kolaborasi lingkungan. Dengan pendekatan yang berkelanjutan dan partisipatif.

Program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan) tidak hanya merupakan inisiatif gerakan masyarakat, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Daerah Kota Bandung No. 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini menjadi pedoman utama dalam upaya sistematis pengelolaan sampah di Kota Bandung, dengan tujuan untuk mengurangi volume sampah, meningkatkan daur ulang, serta mengoptimalkan potensi nilai ekonomi dari sampah yang telah dipilah. Dalam kerangka peraturan ini, Kang Pisman diimplementasikan sebagai strategi untuk merealisasikan visi Kota Bandung bebas sampah. Melalui dukungan regulasi, program ini tidak hanya mendorong perubahan perilaku di tingkat rumah tangga, tetapi juga menegaskan pentingnya peran kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan terintegrasi. (Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9, 2018)

Meskipun berbagai program pengelolaan sampah seperti Kang Pisman telah diterapkan secara masif di Kota Bandung, efektivitas implementasinya di tingkat kelurahan masih menunjukkan variasi hasil. Salah satu wilayah yang menjadi sorotan adalah Kelurahan Situsaeur, yang termasuk dalam kawasan padat penduduk di Kecamatan Bojongloa Kidul. Untuk memahami lebih jauh kondisi aktual pengelolaan sampah di wilayah ini, diperlukan data mengenai potensi timbulan sampah berdasarkan jumlah kepala keluarga dan penduduk per RW. Data ini menjadi dasar penting untuk menilai seberapa besar volume

sampah yang dihasilkan masyarakat, serta sejauh mana bank sampah di wilayah tersebut dapat berperan dalam mengurangi jumlah timbunan sampah. Berikut adalah data potensi timbunan sampah di Kelurahan Situsaeur:

Tabel 1. 4
Jumlah Sampah Perhari Di Kelurahan Situsaeur

RW	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Potensi Timbunan Sampah (Kg/hari)
1	890	1.559	420,93
2	931	1.710	461,70
3	1.584	2.921	788,67
4	2.744	5.214	1.407,78
5	583	1.098	296,46
6	1.294	2.354	635,58
7	1.741	3.270	882,90
8	663	1.259	339,93
Jumlah	10.430	19.385	5.233,95

Sumber: Kelurahan Situsaeur (2025)

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Kelurahan Situsaeur, jumlah timbunan sampah harian di wilayah ini masih tergolong cukup tinggi. Data tersebut mencerminkan besarnya volume sampah yang dihasilkan oleh aktivitas rumah tangga masyarakat setempat. Tingginya angka timbunan sampah mengindikasikan bahwa pola konsumsi masyarakat cukup besar, namun belum diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang efektif. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya upaya pengurangan sampah dari sumber serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk memilah dan mendaur ulang, maka potensi penumpukan sampah akan semakin meningkat. Dalam jangka panjang, hal ini berisiko menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat, terutama apabila sistem pengangkutan dan pengolahan sampah tidak ditingkatkan.

Berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan serta wawancara dengan pihak pengurus bank sampah, petugas kebersihan, dan beberapa warga, ditemukan beberapa permasalahan utama. Pertama, program bank sampah di Kelurahan Situsaeur belum berjalan secara optimal dalam mengurangi volume timbunan sampah rumah tangga. Meskipun program bank sampah telah

dilaksanakan dan masyarakat mulai melakukan pemilahan sampah, jumlah timbunan sampah yang dihasilkan setiap harinya masih tergolong tinggi. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pengurangan sampah memang sudah mengalami perubahan dibandingkan sebelumnya, namun hasil tersebut belum mampu mencapai target yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program bank sampah masih tergolong rendah dan pelaksanaannya belum berjalan secara efektif dalam menekan volume sampah secara signifikan.

Kedua, sasaran program bank sampah dalam upaya pengurangan sampah belum tercapai secara maksimal. Program yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah masih belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Dari hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa masih terdapat warga yang belum aktif mengikuti kegiatan bank sampah maupun melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga. Selain itu, sebagian masyarakat masih menganggap kegiatan bank sampah hanya sebatas kegiatan tambahan dan belum menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengurangi timbunan sampah belum tercapai secara optimal.

Ketiga, partisipasi masyarakat terhadap pelayanan dan fasilitas bank sampah masih tergolong rendah karena sarana pendukung pengelolaan sampah belum memadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus bank sampah dan masyarakat, diketahui bahwa keterbatasan fasilitas seperti tempat penyimpanan sampah terpilah, alat pengangkut sampah, serta sarana pengolahan sampah menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program. Kurangnya fasilitas tersebut membuat proses pengumpulan dan pengelolaan sampah tidak berjalan secara rutin dan maksimal. Selain itu, kondisi fasilitas yang terbatas juga memengaruhi minat masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan bank sampah karena pelayanan yang diberikan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Keempat, kesesuaian antara input program dengan output yang dihasilkan masih belum optimal. Input program yang meliputi sumber daya manusia, fasilitas, dukungan operasional, serta partisipasi masyarakat belum mampu menghasilkan output berupa pengurangan dan pemilahan sampah secara maksimal. Berdasarkan hasil observasi, masih ditemukan kendala dalam koordinasi antar pihak yang terlibat, baik antara pengurus bank sampah, petugas kebersihan, maupun masyarakat. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan kurangnya keterlibatan masyarakat menyebabkan hasil pengelolaan sampah belum menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap pengurangan volume sampah di lingkungan Kelurahan Situsaur. Dengan demikian, pelaksanaan operasional bank sampah masih belum menunjukkan keseimbangan yang baik antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang dicapai.

Kelima, pencapaian tujuan menyeluruh dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kelurahan Situsaur masih belum tercapai secara efektif. Meskipun pemerintah dan pihak terkait telah melaksanakan berbagai program pengelolaan sampah, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak hambatan. Sistem pengelolaan sampah yang seharusnya melibatkan koordinasi antara masyarakat, pengurus bank sampah, dan petugas kebersihan belum berjalan secara maksimal. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurangan sampah dan pemanfaatan sampah terpilah juga masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan utama pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan terintegrasi belum dapat tercapai sesuai dengan harapan.

Meskipun berbagai program pengelolaan sampah telah diterapkan di Kota Bandung, termasuk pembentukan bank sampah di berbagai kelurahan, kajian mengenai sejauh mana efektivitas operasional bank sampah dalam mengurangi timbunan sampah masih terbatas, khususnya di wilayah Kelurahan Situsaur, Kecamatan Bojong Loa Kidul. Banyak penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek edukasi lingkungan atau perilaku masyarakat dalam memilah sampah, namun belum banyak yang secara spesifik menelaah

hubungan langsung antara kinerja operasional bank sampah dan penurunan volume sampah di wilayah tertentu. Padahal, efektivitas bank sampah sangat bergantung pada faktor-faktor seperti sistem pengelolaan, partisipasi masyarakat, dan koordinasi dengan lembaga terkait. Ketiadaan data dan analisis mendalam mengenai hal ini menciptakan kesenjangan informasi (research gap) yang perlu diisi agar program pengelolaan sampah dapat dioptimalkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal.

Idealnya, bank sampah di tingkat kelurahan berperan sebagai aspek utama dalam mengurangi timbunan sampah melalui penerapan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, yang menegaskan pentingnya pengelolaan sampah guna menekan volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun, dalam praktiknya, efektivitas operasional bank sampah di beberapa wilayah, termasuk di Kelurahan Situsaeur, belum berjalan optimal. Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai bank sampah di Kota Bandung cenderung menyoroti manfaat ekonomi dan tingkat partisipasi masyarakat, tetapi belum banyak yang membahas aspek efektivitas operasional bank sampah secara mendalam, terutama dalam konteks pengurangan timbunan sampah di kawasan padat penduduk seperti Situsaeur.

Melihat kondisi tersebut, dibutuhkan upaya nyata yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan sampah. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melalui kegiatan bank sampah. Bank sampah dapat membantu mengurangi jumlah sampah sejak dari rumah, dengan cara memilah dan memanfaatkan kembali sampah yang masih bernilai guna. Namun, seberapa efektif bank sampah bekerja di lapangan masih belum banyak diketahui. Karena itu, penelitian ini akan membahas tentang: **“Efektivitas Operasional Bank Sampah dalam Mengurangi Timbunan Sampah di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam pengelolaan bank sampah di Kelurahan Situsaeur sebagai berikut:

1. Program bank sampah di Kelurahan Situsaeur belum berjalan secara optimal dalam mengurangi volume timbunan sampah, sehingga keberhasilan program masih rendah.
2. Sasaran program bank sampah dalam pengurangan sampah belum tercapai secara maksimal.
3. Partisipasi masyarakat terhadap pelayanan dan fasilitas bank sampah masih rendah karena sarana pendukung pengelolaan sampah belum memadai.
4. Kesesuaian antara input program, seperti sumber daya, fasilitas, dan partisipasi masyarakat, dengan output yang dihasilkan berupa pengurangan dan pemilahan sampah masih belum optimal.
5. Pencapaian tujuan menyeluruh pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kelurahan Situsaeur masih belum tercapai secara efektif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keberhasilan program bank sampah dalam mengurangi volume timbunan sampah di Kelurahan Situsaeur?
2. Bagaimana pencapaian sasaran program bank sampah dalam mengurangi timbunan sampah di Kelurahan Situsaeur?
3. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan fasilitas bank sampah di Kelurahan Situsaeur?
4. Bagaimana kesesuaian antara input program dengan output yang dihasilkan dalam operasional bank sampah di Kelurahan Situsaeur?
5. Bagaimana pencapaian tujuan menyeluruh program bank sampah dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kelurahan Situsaeur?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui keberhasilan program bank sampah dalam mengurangi volume timbunan sampah di Kelurahan Situsaeur.
2. Menganalisis pencapaian sasaran pengurangan sampah di Kelurahan Situsaeur.
3. Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan fasilitas bank sampah di Kelurahan Situsaeur.
4. Mengevaluasi kesesuaian antara input program dengan output yang dihasilkan dalam operasional bank sampah di Kelurahan Situsaeur.
5. Mengetahui pencapaian tujuan menyeluruh program bank sampah dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kelurahan Situsaeur.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam kajian efektivitas program publik di bidang pengelolaan lingkungan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman teoritis mengenai efektivitas operasional bank sampah dalam mengurangi timbunan sampah, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat dan implementasi program lingkungan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam melakukan riset ilmiah, khususnya dalam menganalisis efektivitas program lingkungan berbasis masyarakat. Peneliti juga memperoleh pengalaman langsung dalam mengumpulkan dan menganalisis data di lapangan.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja operasional bank sampah, serta membantu dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat dalam pengelolaan sampah di tingkat kelurahan. Selain itu, instansi terkait dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk mengembangkan program yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan aktif dalam pengelolaan sampah, terutama melalui aktivitas bank sampah. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat memahami nilai ekonomi dan manfaat lingkungan yang dapat diperoleh dari kegiatan pemilahan serta pemanfaatan sampah secara mandiri di lingkungannya.

F. Kerangka Pemikiran

Permasalahan sampah di wilayah perkotaan seperti Kota Bandung menunjukkan tingkat kompleksitas yang tinggi. Tingginya volume timbunan sampah setiap hari di Kelurahan Situsaur menjadi salah satu indikasi bahwa sistem pengelolaan sampah dari sumber masih belum berjalan optimal. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Kota Bandung mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui program berbasis komunitas seperti bank sampah yang berlandaskan pada prinsip Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan).

Bank sampah hadir sebagai solusi alternatif pengelolaan sampah yang bertujuan mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan cara memilah dan memanfaatkan sampah sejak dari

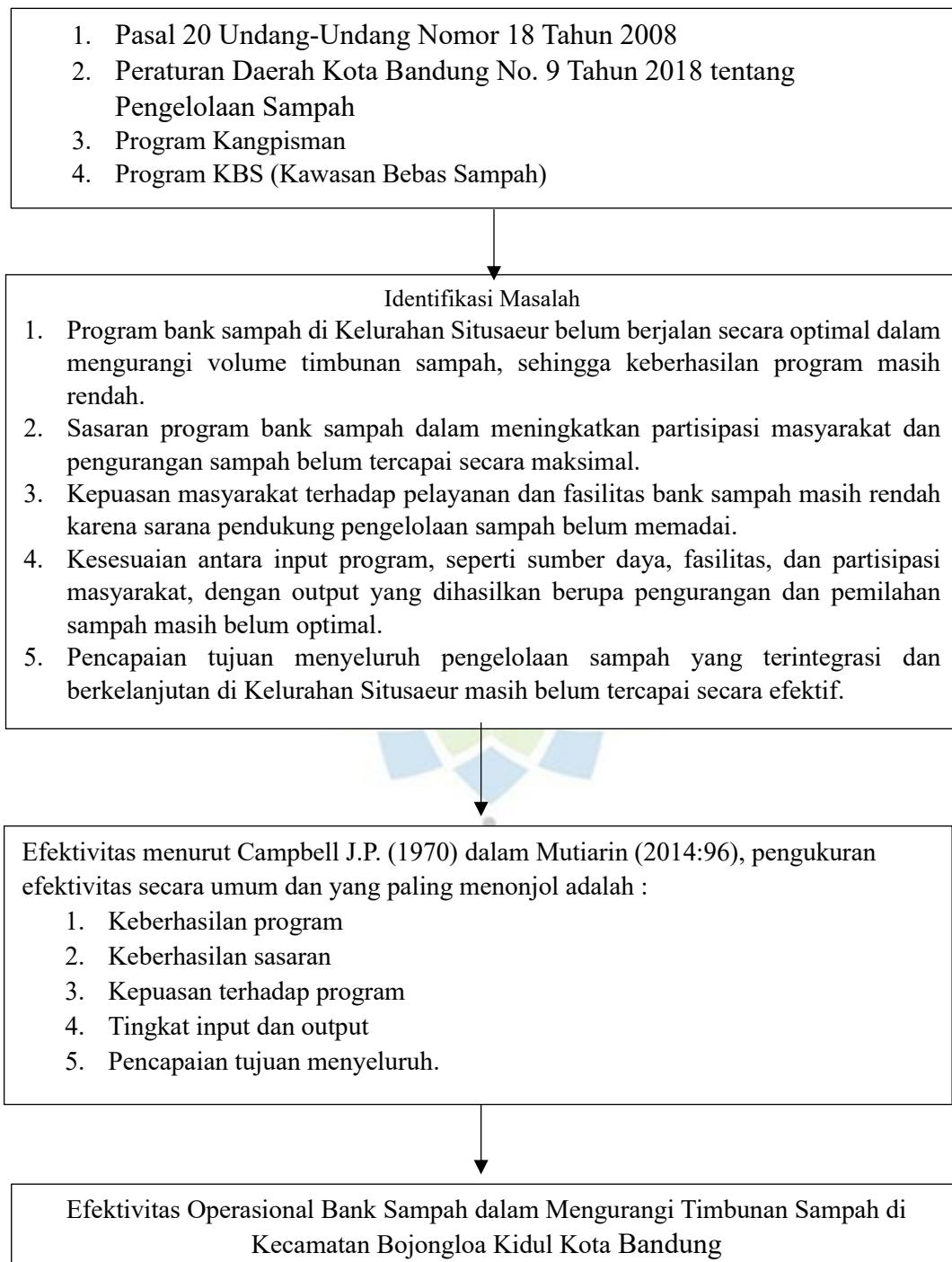
sumbernya. Masyarakat dapat menyetorkan sampah terpilah yang memiliki nilai guna, lalu dicatat seperti tabungan dan ditukarkan dengan insentif ekonomi. Meski demikian, keberadaan bank sampah belum tentu menjamin keberhasilan pengurangan timbulan sampah secara signifikan. Diperlukan evaluasi terhadap efektivitas operasional bank sampah di wilayah tertentu.

Operasional bank sampah di Kelurahan Situsaeur pada dasarnya telah berjalan sebagai salah satu upaya dalam mengurangi timbulan sampah, namun tingkat keberhasilannya masih terbatas karena adanya kendala partisipasi masyarakat dan fasilitas yang belum memadai. Sasaran pengurangan volume sampah melalui program bank sampah juga belum sepenuhnya tercapai, mengingat jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan dan dikelola masih relatif kecil dibandingkan dengan total timbulan sampah harian di kelurahan. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap keberadaan dan pelayanan bank sampah pun merasa terbantu karena adanya manfaat ekonomi dan lingkungan.

Lebih jauh, kesesuaian antara input berupa sumber daya, partisipasi masyarakat, dan ketersediaan fasilitas dengan output berupa volume sampah terpilah dan jumlah sampah yang berhasil didaur ulang masih belum seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi bank sampah terhadap pengurangan sampah belum optimal. Walaupun demikian, operasional bank sampah tetap memberikan kontribusi positif terhadap pengurangan sampah di Kelurahan Situsaeur, meski kontribusinya belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pengelolaan sampah yang lebih luas.

Maka dari itu penelitian ini mengacu pada teori efektivitas menurut Campbell dalam Mutiarin (2014:96), pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh.



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran
Sumber: Diolah peneliti (2025)